

## PENOLAKAN UNI EROPA TERHADAP *FAST-TRACK MEMBERSHIP* UKRAINA PADA TAHUN 2022

Muhamad Adib Hadafi, Ismiyatun

*Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Wahid Hasyim*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penolakan Uni Eropa terhadap permintaan fast-track membership Ukraina pada tahun 2022. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu sumber didapat dari buku, jurnal, serta sumber-sumber dari berita online yang kompeten dan menggunakan teori Konstruktivisme, penelitian ini menghasilkan faktor pendorong penolakan Uni Eropa terhadap aplikasi Ukraina; 1) faktor norma, lamanya proses menjadi anggota Uni Eropa dan persyaratan yang harus dipenuhi and 2) Faktor identitas karena adanya perbedaan identitas nasional antara Ukraina dan Uni Eropa.*

**Kata Kunci:** *Uni Eropa, Ukraina, Fast Track Membership, Konstruktivism*

### A. Pendahuluan

Uni Eropa adalah suatu organisasi regional yang menghimpun negara-negara di benua Eropa dalam suatu kerangka kerjasama yang bertujuan untuk menghindari konflik. Organisasi ini terbentuk atas dasar ide dari seorang diplomat asal Perancis, Jean Monet. Monet berpandangan bahwa sebuah organisasi regional dapat mencegah berulangnya kehancuran Eropa seperti yang terjadi pasca Perang Dunia I dan II. Kerjasama dalam organisasi tersebut akan menciptakan sebuah ketergantungan antar negara sehingga potensi untuk saling menginvasi satu sama lain menjadi lebih kecil (Christiansen, 2001).

Bermula dari pembentukan *European Coal and Steel Community* (ECSC) pada tahun 1952, organisasi ini terus berkembang hingga menjadi Uni Eropa di tahun 1992 yang ditandai dengan ditandatanganinya *Treaty of European Union* di Maastricht atau dikenal juga dengan sebutan *Maastricht Treaty*. Hingga saat ini, Uni Eropa telah memiliki 27 negara anggota yang saling bekerjasama dalambidang ekonomi, moneter, politik, transportasi dll (Pasuhuk, 2022).

Pada ekspansi 2004 yang bersejarah, Uni Eropa merangkul delapan negara bekas komunis termasuk Polandia, negara-negara Baltik, Hongaria, Slovakia, Slovenia, dan Republik Ceko, serta pulau-pulau Mediterania di Siprus dan Malta. Pada 2007, para mantan pendukung Blok Timur yaitu Bulgaria dan Romania juga bergabung, diikuti oleh Kroasia

pada 2013. Kemudian pada 2016 muncul kejutan dari referendum Brexit ketika Inggris memilih untuk pergi. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa diselesaikan pada 2020. Uni Eropa sekarang memiliki 27 anggota.

Pada 28 Februari 2022, Presiden Zelenskyy menandatangani permintaan resmi agar Ukraina bergabung dengan UE. Presiden Zelenskyy meminta Ukraina segera menjadi anggota Uni Eropa, mengusulkan hal ini dilakukan di bawah "prosedur khusus baru". Dia berkata, "Tujuan kami adalah untuk bersama dengan semua orang Eropa dan, yang paling penting, berada di pijakan yang sama".

Pada 1 Maret, Parlemen Eropa mengadakan sidang pleno luar biasa. Hal ini disampaikan dari jarak jauh oleh Presiden Zelenskyy dari Ukraina, dan Ketua Parlemen Ukraina, Ruslan Stefanchuk. Setelah memperbarui perkembangan di lapangan, Presiden Zelenskyy mengatakan bahwa bangsa ukraina sangat termotivasi. "Kami berjuang untuk hak kami, untuk kebebasan kami dan untuk hidup kami. Sekarang kami berjuang untuk kelangsungan hidup kami, dan ini adalah motivasi tertinggi kami, tetapi kami juga berjuang untuk menjadi anggota Eropa yang setara. Hari ini, saya percaya bahwa kita semua menunjukkan kepada dunia dari apa kita sebenarnya. Uni Eropa akan jauh lebih kuat bersama kami – itu sudah pasti. Tanpa Anda, Ukraina akan sendirian."

Emmanuel Macron yang memimpin para pemimpin Eropa Barat menolak seruan dari Volodymyr Zelenskiy untuk keanggotaan Uni Eropa jalur cepat untuk Ukraina meskipun mendapat dukungan dari negara-negara anggota timur. Pada pertemuan puncak di Versailles, 27 negara Uni Eropa mengakui sebagai salah satu "pergeseran tektonik dalam sejarah Eropa" yang disebabkan oleh invasi Rusia ke tetangganya dan berjanji untuk meningkatkan kekuatan militer mereka dan "memperkuat ikatan kita dan memperdalam kemitraan kita" dengan Kyiv. Namun seruan dari presiden Ukraina, yang didukung oleh Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania dan Polandia, untuk proses keanggotaan khusus gagal meyakinkan Prancis, Jerman, Spanyol atau Belanda.

Presiden Prancis mengatakan dia ingin "mengirim sinyal kuat pada periode ini ke Ukraina dan Ukraina" solidaritas tetapi "pada saat yang sama, kita harus waspada", menambahkan bahwa dia tidak mungkin untuk "membuka prosedur akses." dengan negara yang sedang berperang. Jika kita menutup pintu dan mengatakan tidak akan pernah, itu tidak adil," katanya. Mark Rutte, perdana menteri Belanda, mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada prospek keanggotaan UE untuk Ukraina dalam jangka pendek. Dia berkata: "Semua negara di bagian barat Eropa yang saya ajak bicara mengatakan bahwa Anda tidak

boleh mencoba untuk memiliki prosedur jalur cepat atau proses akses yang dipercepat. yang penting adalah bahwa Ukraina telah meminta untuk menjadi anggota Uni Eropa, Tidak ada prosedur jalur cepat untuk menjadi anggota Uni Eropa.” Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Alasan mengapa Uni Eropa menolak *fast-track membership* Ukraina pada tahun 2022?”

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif. Menurut Nazir, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Prasetyo, 2022). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan tipe kualitatif adalah penelitian dengan mengkolaborasikan antara penelitian di perpustakaan (Library Research) atau studi pustaka dengan Penelitian Lapangan (Field Research).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Proses Masuk Uni Eropa

Melalui kerangka berpikir konstruktivisme, faktor norma yang dimiliki Uni Eropa memiliki peran dalam penolakan *fast-track membership* Ukraina. Norma dalam hal ini adalah aturan yang sudah dimiliki oleh Uni Eropa dalam menerima negara menjadi anggota Uni Eropa yaitu proses dan syarat masuk Uni Eropa.

Menjadi anggota Uni Eropa adalah prosedur kompleks yang tidak terjadi dalam semalam. Setelah negara pemohon memenuhi persyaratan keanggotaan, negara tersebut harus menerapkan aturan dan regulasi UE di semua bidang. Sebuah negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa mengajukan aplikasi keanggotaan ke Dewan, yang meminta Komisi untuk menilai kemampuan pemohon untuk memenuhi kriteria Kopenhagen. Jika pendapat Komisi positif, dewan kemudian harus menyetujui mandat negosiasi. Negosiasi kemudian secara resmi dibuka berdasarkan subjek per subjek (europa.eu, 2022).

Prosedur reguler untuk keanggotaan Uni Eropa terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah ketika suatu negara diberikan status calon resmi untuk keanggotaan. Tahap kedua adalah ketika negosiasi keanggotaan antara UE dan negara kandidat dimulai, yang merupakan proses yang mencakup adopsi undang-undang UE ke dalam undang-undang

nasional, dan persiapan penerapan undang-undang ini di bidang peradilan, administrasi, ekonomi, serta seperti reformasi lainnya (schengenvisa.info, 2022).

Proses bergabung dengan Uni Eropa secara garis besar terdiri dari 3 tahap. Pertama, ketika suatu negara siap, ia menjadi calon resmi untuk keanggotaan – tetapi ini tidak berarti bahwa negosiasi formal telah dibuka. Kemudian, kandidat beralih ke negosiasi keanggotaan formal, sebuah proses yang melibatkan adopsi undang-undang Uni Eropa yang telah ditetapkan, persiapan untuk berada dalam posisi untuk menerapkan dan menegakkannya dengan benar, dan implementasi reformasi peradilan, administrasi, ekonomi, dan lainnya yang diperlukan bagi negara untuk memenuhi syarat untuk bergabung, yang dikenal sebagai kriteria akses. Selanjutnya, ketika negosiasi dan reformasi yang menyertainya telah diselesaikan dengan kepuasan kedua belah pihak, negara tersebut dapat bergabung dengan Uni Eropa (europa.eu, 2022).

Negosiasi keanggotaan tidak dapat dimulai sampai semua pemerintah Uni Eropa menyetujui, dalam bentuk keputusan bulat oleh Dewan Uni Eropa, tentang kerangka kerja atau mandat untuk negosiasi dengan negara kandidat. Negosiasi berlangsung antara menteri dan duta besar pemerintah Uni Eropa dan negara kandidat dalam apa yang disebut konferensi antar pemerintah.

Negosiasi setiap bab didasarkan pada elemen-elemen *screening* dan *negotiating positions*. *Screening* (Penyaringan) dimana Komisi melakukan pemeriksaan rinci, bersama dengan negara kandidat, dari setiap bidang kebijakan (bab), untuk menentukan seberapa baik negara tersebut dipersiapkan. Temuan demi bab disajikan oleh Komisi kepada Negara-negara Anggota dalam bentuk laporan penyaringan. Kesimpulan dari laporan ini adalah rekomendasi dari Komisi untuk membuka negosiasi secara langsung atau mensyaratkan bahwa kondisi tertentu – tolok ukur pembukaan – harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah *Negotiating positions*. Sebelum negosiasi dapat dimulai, negara kandidat harus menyerahkan posisinya dan Uni Eropa harus mengadopsi posisi bersama. Untuk sebagian besar bab, Uni Eropa akan menetapkan tolok ukur penutupan dalam posisi ini yang harus dipenuhi oleh Negara Kandidat sebelum negosiasi di bidang kebijakan yang bersangkutan dapat ditutup. Untuk bab 23 dan 24, Komisi mengusulkan bahwa di masa depan bab-bab ini akan dibuka berdasarkan rencana aksi, dengan tolok ukur sementara yang harus dipenuhi berdasarkan implementasinya sebelum tolok ukur penutupan ditetapkan.

Laju negosiasi kemudian tergantung pada kecepatan reformasi dan keselarasan dengan undang-undang Uni Eropa di masing-masing negara. Durasi negosiasi dapat bervariasi –

dimulai pada waktu yang sama dengan negara lain tidak menjamin selesai pada waktu yang sama (europa.eu, 2022).

Uni Eropa memiliki Proses khusus untuk Balkan Barat. Hubungan Uni Eropa dengan negara-negara Balkan Barat berlangsung dalam kerangka khusus yang dikenal sebagai proses stabilisasi dan asosiasi yang memiliki 3 tujuan yaitu menstabilkan negara-negara secara politik dan mendorong transisi cepat mereka ke ekonomi pasar, mempromosikan kerjasama regional dan akhirnya menjadi anggota Uni Eropa. Suatu negara ditawarkan prospek keanggotaan (menjadi kandidat potensial). Ini berarti harus ditawarkan status calon resmi ketika sudah siap. Proses ini membantu negara-negara yang bersangkutan membangun kapasitas mereka untuk mengadopsi dan menerapkan hukum Uni Eropa, serta standar Eropa dan internasional. Ini didasarkan pada kemitraan yang semakin erat, dengan Uni Eropa menawarkan campuran dari konsesi perdagangan, bantuan ekonomi dan keuangan, bantuan untuk rekonstruksi, pembangunan dan stabilisasi, stabilisasi dan perjanjian asosiasi – hubungan kontrak yang berjangkauan luas dengan Uni Eropa, yang mencakup hak dan kewajiban bersama. Setiap negara bergerak selangkah demi selangkah menuju keanggotaan Uni Eropa karena memenuhi komitmennya dalam proses stabilisasi dan asosiasi. Komisi menilai kemajuan yang dibuat dalam laporan kemajuan tahunan yang diterbitkan setiap Musim Gugur (europa.eu, 2022).

Proses bergabung menjadi bagian dari Uni Eropa dari negara satu ke negara yang lain memakan waktu yang berbeda-beda. Seluruh proses, mulai dari pengajuan keanggotaan hingga keanggotaan biasanya memakan waktu sekitar satu dekade, meskipun beberapa negara, terutama Swedia, Finlandia, dan Austria lebih cepat, hanya memakan waktu beberapa tahun. Proses dari pengajuan perjanjian asosiasi hingga aksesinya memakan waktu jauh lebih lama bahkan hingga beberapa dekade, bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam beberapa bulan. Sehingga, dalam menanggapi aplikasi diajukan Ukraina pada 28 Februari 2022, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengadopsi nada yang lebih hati-hati. Sambil mencatat bahwa Ukraina adalah bagian dari Uni Eropa, namun semua orang sadar bahwa bergabung dengan Uni Eropa melibatkan proses transformasi yang intensif dan berjangkauan luas. Pada KTT para pemimpin Uni Eropa di Versailles pada 10 dan 11 Maret 2022, Presiden Macron dari Prancis mengatakan dia ingin untuk mengirim pesan solidaritas ke Ukraina tetapi tidak mungkin untuk membuka prosedur aksesinya dengan negara yang sedang berperang. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte mengatakan tidak mungkin ada prosedur jalur cepat. Terlepas dari tantangannya, perang di Ukraina tidak bisa menjadi

katalis untuk mempercepat akses UE ke Uni Eropa dan Uni Eropa tidak pernah menguraikan "prosedur khusus" untuk akses cepat karena keadaan yang meringankan (Fella, 2022).

## 2. Syarat Masuk Uni Eropa

Kriteria aksesia atau yang dikenal sebagai kriteria Kopenhagen adalah persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh semua negara calon untuk menjadi negara anggota. Adapun Kriteria Kopenhagen meliputi:

1. Kriteria politik: stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan penghormatan dan perlindungan minoritas.
2. Kriteria ekonomi: ekonomi pasar yang berfungsi dan kapasitas untuk mengatasi persaingan dan kekuatan pasar;
3. Kapasitas administratif dan kelembagaan untuk secara efektif mengimplementasikan *acquis* (ec.europa.eu, 2022).

### 2.1 Kriteria Politik

Kriteria Politik Kopenhagen didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dan aturan hukum. Evaluasi demokrasi dan supremasi hukum mencakup faktor-faktor tertentu: pemilihan umum, fungsi legislatif, operasi eksekutif, masyarakat sipil, reformasi administrasi publik, fungsi peradilan, memerangi korupsi dan memerangi kejahatan terorganisir. Kriteria Politik Kopenhagen juga mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan minoritas, sementara lembaga dan stabilitas demokrasi dianggap oleh Komisi sebagai dasar untuk perbaikan dan pemeliharaan lingkungan yang melindungi hak asasi manusia (Fierro, 2003).

Kondisi pemenuhan kriteria politik yang dirumuskan oleh Uni Eropa adalah legal dan konsekuensi politik dari prinsip-prinsip dasar Uni Eropa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 di Perjanjian Persatuan Amsterdam dan Nice. Pasal 6 (1) *Treaty on European Union* (TEU) menyatakan: "Persatuan didirikan atas prinsip-prinsip kebebasan, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dan supremasi hukum; nilai-nilai ini umum untuk semua Negara Anggota." Mengenai nilai-nilai Uni, Pasal 2 dari Konstitusi untuk Eropa menyatakan bahwa Serikat didirikan di atas nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai ini umum untuk negara

anggota dalam masyarakat pluralisme, toleransi, keadilan, solidaritas dan nondiskriminasi (Hochleitner, 2005).

Kriteria politik adalah kriteria penting yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa. Saat membuat penilaian, Dewan Eropa menganalisis panggung politik suatu negara melalui kehadiran demokrasi yang berfungsi, perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum dan perlindungan dan penghormatan terhadap minoritas. Perlindungan hak asasi manusia sangat penting jika suatu negara akan dianggap menjadi anggota Uni Eropa. Definisi dan komposisi hak asasi manusia tersebut adalah yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perlindungan hak asasi manusia telah menyebabkan beberapa negara yang memenuhi syarat untuk membuat perubahan sistematis besar dalam fungsi pemerintahan masing-masing agar sejalan dengan persyaratan UE. Pasal-pasal dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia tahun 1953 adalah perjanjian lain yang digunakan ketika menetapkan perlindungan hak asasi manusia di suatu negara. Aturan hukum adalah kriteria politik lain yang digunakan oleh Dewan Eropa, dan menyatakan bahwa otoritas pemerintah hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum tertulis yang mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam adopsi mereka. Setiap negara yang ingin menjadi anggota Uni Eropa juga diharuskan memiliki demokrasi fungsional di mana semua warga negara yang memenuhi syarat diizinkan untuk berpartisipasi secara setara dalam membuat keputusan politik di semua tingkat pemerintahan. Demokrasi fungsional seperti itu diperlukan untuk memiliki pers yang bebas, kebebasan berpendapat pribadi, dan serikat pekerja yang bebas (Sawe, 2017).

Negara-negara diharuskan menyelenggarakan pemilihan umum demokratis yang bebas dan adil melalui pemungutan suara rahasia, dan partai-partai politik yang berpartisipasi tidak boleh dihalangi oleh pemerintah untuk melaksanakan mandat mereka. Penghormatan terhadap minoritas adalah tolok ukur lain yang digunakan untuk memeriksa kelayakan suatu negara. Negara-negara yang ingin menjadi negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk melindungi dan menghormati minoritas nasional mereka. Ketentuan ini ditetapkan selama Konvensi Kerangka Kerja untuk Perlindungan Minoritas Nasional, tetapi konvensi tersebut tidak jelas tentang definisi "minoritas nasional" yang menyebabkan negara-negara anggota Uni Eropa membuat pernyataan resmi tentang definisi mereka masing-masing tentang minoritas nasional. Kriteria politik juga digunakan ketika menganalisis negara-negara di bawah Kebijakan Lingkungan Eropa yang

memenuhi syarat untuk menerima dukungan keuangan dari Uni Eropa. Negara-negara yang dianggap melanggar ketentuan yang ditetapkan Uni Eropa tentang perlindungan hak asasi manusia, keberadaan demokrasi yang berfungsi dan perlindungan minoritas nasional, tidak menerima dukungan dari Uni Eropa (Sawe, 2017).

Kriteria politik dapat didefinisikan sebagai stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, serta penghormatan dan perlindungan terhadap minoritas. Definisi yang luas ini memperoleh makna konkrit dengan konvensi internasional seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan kasus- hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Selain itu, dokumen organisasi internasional seperti United Nations dan Organization for Security and Cooperation in Europe juga penting untuk menentukan standar dan norma kriteria politik (Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs, 2022).

Persyaratan dasar dari setiap konsepsi demokrasi adalah pemilihan umum yang bebas dan adil, yang memungkinkan pergantian kekuasaan politik secara damai. Konsep demokrasi mengacu pada keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Dalam praktiknya, ini biasanya dicapai melalui pemilihan umum, di mana semua warga negara dapat memilih perwakilan untuk membuat keputusan tentang nama mereka di parlemen nasional. Tata pemerintahan demokratis yang fungsional mensyaratkan bahwa semua warga negara harus dapat berpartisipasi, atas dasar kesetaraan, dalam pengambilan keputusan politik di setiap tingkat pemerintahan, dari kotamadya lokal hingga tingkat tertinggi, nasional. Oleh karena itu, pemilihan umum reguler yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara rahasia, hak pilih universal untuk orang dewasa, sistem politik multipartai yang kompetitif adalah penting, hak untuk mendirikan partai politik tanpa hambatan dari negara, akses yang adil dan setara ke pers yang bebas, organisasi serikat pekerja bebas, kebebasan berpendapat pribadi, dan kekuasaan eksekutif dibatasi oleh undang-undang dan memungkinkan akses bebas ke hakim independen dari eksekutif (Hatton, 2022).

Supremasi hukum adalah seperangkat prinsip hukum yang penting untuk realisasi praktis hak-hak warga negara Eropa. Aturan hukum mempertahankan negara demokratis melalui kepastian hukum, yang meningkatkan prediktabilitas keputusan resmi dan memungkinkan orang untuk merencanakan hidup mereka. Tanpa aturan hukum, Uni Eropa mau tidak mau gagal berfungsi secara memadai dan memberikan barang publik yang diharapkan dijamin. Terlebih lagi, itu tidak lagi memberikan legitimasi moral di mata



orang-orang di Eropa dan sekitarnya. Bahwa Uni dan Negara-negara Anggota konstituennya berbagi komitmen terhadap aturan hukum, terlebih lagi, merupakan dasar bagi rasa saling percaya mereka. Keyakinan ini hanya dapat ada dalam kondisi yang menjamin bahwa orang dan bisnis diperlakukan sesuai dengan hukum di semua negara Anggota, termasuk ketika mereka mengajukan banding ke pengadilan di Negara selain negara mereka sendiri, dan bahwa hak-hak mereka dilindungi (Helsinki Rule of Law Forum, 2022).

Hak asasi manusia adalah standar yang mengakui dan melindungi martabat semua manusia. Hak asasi manusia mengatur bagaimana individu manusia hidup dalam masyarakat dan satu sama lain, serta hubungan mereka dengan Negara dan kewajiban yang dimiliki Negara terhadap mereka (UNICEF, 2022). Penghormatan terhadap hak-hak dasar pada prinsipnya dijamin di sebagian besar negara pemohon. Semua telah menyetujui Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental dan Protokol yang memungkinkan warga untuk membawa kasus ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Kebebasan berekspresi dan berserikat dijamin di semua negara pemohon, tetapi independensi radio dan televisi perlu diperkuat dalam beberapa kasus (European Convention on Human Rights, 2022).

Uni Eropa didasarkan pada komitmen yang kuat untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum di seluruh dunia. Kebijakan Uni Eropa termasuk mempromosikan hak-hak perempuan, anak-anak, minoritas dan orang-orang terlantar, menentang hukuman mati, penyiksaan, perdagangan manusia dan diskriminasi, membela hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, membela hak asasi manusia melalui kemitraan aktif dengan negara-negara mitra, organisasi internasional dan regional, kelompok dan asosiasi di semua tingkat masyarakat, penyertaan klausul hak asasi manusia dalam semua perjanjian perdagangan atau kerja sama dengan negara-negara non-Uni Eropa (European Convention on Human Rights, 2022).

Hak-hak minoritas adalah tentang memastikan penghormatan terhadap identitas yang berbeda sambil memastikan bahwa setiap perlakuan berbeda terhadap kelompok atau orang yang termasuk dalam kelompok tersebut tidak menutupi praktik dan kebijakan diskriminatif<sup>1</sup>. Kandidat negara Uni Eropa harus mengakui hak-hak minoritas dalam konstitusi dan undang-undang nasional mereka. Undang-undang perlu diperkenalkan yang

memungkinkan anak-anak tanpa kewarganegaraan dan non-warga negara memperoleh kewarganegaraan, menghilangkan hambatan hukum bagi minoritas untuk dipekerjakan dalam administrasi publik dan sektor swasta, jaminan hak untuk menggunakan bahasa minoritas, terutama dalam pendidikan dan berurusan dengan pelayanan publik dan sistem hukum, dan jaminan akses yang sama bagi minoritas untuk perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan (OHCHR, 2022).

## 2.2 Kriteria Ekonomi

Dewan Eropa Kopenhagen atau *the Copenhagen European Council* pada 22 Juni 1993 menetapkan persyaratan bagi negara-negara kandidat sebelum mereka memenuhi syarat untuk menjadi anggota. Kondisi ini mengharuskan negara anggota untuk memenuhi kriteria politik dan ekonomi dan memiliki kemampuan untuk mengambil kewajiban keanggotaan. Dalam konteks kriteria ekonomi, negara-negara kandidat diharapkan untuk mencapai keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi serta kapasitas untuk mengatasi tekanan persaingan dan kekuatan pasar di dalam Uni Eropa (European Council, 2022).

Keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi membutuhkan pencapaian stabilitas makroekonomi, fungsi pasar produk yang efisien melalui peningkatan lingkungan bisnis, menghilangkan hambatan masuk/keluar pasar, membangun sistem hukum yang berfungsi dengan baik terutama di bidang hak kekayaan intelektual dan industri, mengurangi pengaruh negara terhadap pasar produk, mengembangkan pasar keuangan dengan mencapai stabilitas keuangan dan memfasilitasi akses ke keuangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kelancaran fungsi pasar tenaga kerja. Untuk dapat bersaing dengan sukses dengan kekuatan pasar di Uni Eropa, selain keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi, perlu untuk meningkatkan modal fisik dan manusia, mendukung pendidikan dan inovasi, meningkatkan struktur bisnis dan sektoral, mengurangi peran negara. dalam ekonomi melalui privatisasi, dan meningkatkan integrasi dengan Uni Eropa melalui perdagangan dan investasi (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, 2022).

Pemantauan kemajuan negara-negara kandidat dalam memenuhi kriteria akses ekonomi dinilai setiap tahun oleh Komisi Eropa dalam laporan kemajuannya di setiap negara kandidat. Di Komisi Eropa, Direktorat Jenderal Perekonomian dan Keuangan (the Directorate-General for Economic and Financial Affairs) bertugas memantau dan menilai kemajuan kandidat dan negara kandidat potensial dalam memenuhi dua kriteria ekonomi

Kopenhagen. Komisi Eropa memantau serangkaian sub-kriteria untuk setiap kriteria akses ekonomi. Keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi mencirikan kemajuan negara menuju pasar ekonomi dan perlu ditetapkan sebagai prioritas jangka pendek. Menjadi ekonomi pasar yang berfungsi membutuhkan adanya konsensus yang luas tentang esensi kebijakan ekonomi, Stabilitas makroekonomi, interaksi bebas dari kekuatan pasar, masuk dan keluar pasar bebas dan sistem hukum yang memadai<sup>2</sup>.

Kapasitas untuk mengatasi tekanan persaingan dan kekuatan pasar di dalam Uni Eropa, sebagai salah satu kriteria ekonomi Uni Eropa, berhubungan dengan kualitas fungsi ekonomi, alokasi sumber daya yang efisien dan kekuatan relatif dari bersaing dengan produk negara lain, terutama di pasar Uni Eropa. Untuk dapat mengatasi tekanan kompetitif atas akses ke UE, negara kandidat harus merestrukturisasi ekonominya secara keseluruhan. Dalam konteks ini, sangat penting bahwa negara merestrukturisasi sektor-sektor yang mewakili ekonominya tulang punggung (Azizi, 2015).

Tidak terpenuhinya prasyarat ekonomi untuk keanggotaan Uni Eropa merupakan peluang yang sia-sia bagi suatu negara dalam jalan menuju Uni Eropa dan tanda hasil yang buruk di lingkungan ekonomi sejauh menyangkut ekonomi nasional. Jelaslah bahwa kriteria ekonomi untuk keanggotaan Uni Eropa mengandung efek jangka pendek maupun jangka panjang dan tujuan. Dalam hal tujuan jangka pendek, kriteria telah ditetapkan untuk menciptakan ekonomi yang stabil, padahal tujuan utama dalam tujuan jangka panjang adalah untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan (Azizi, 2015).

Koordinasi kebijakan ekonomi Negara-negara Anggota dalam Uni harus dikembangkan dalam konteks pedoman kebijakan ekonomi yang luas dan pedoman ketenagakerjaan, sebagaimana diatur oleh *the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)*, dan harus mencakup kepatuhan dengan prinsip-prinsip panduan harga yang stabil, keuangan publik yang sehat dan berkelanjutan dan kondisi moneter dan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Ada kebutuhan untuk mengambil pelajaran dari dekade pertama berfungsinya serikat ekonomi dan moneter dan, khususnya, untuk tata kelola ekonomi yang lebih baik di Serikat yang dibangun di atas kepemilikan nasional yang lebih kuat. Pencapaian dan pemeliharaan pasar internal yang dinamis harus dianggap sebagai elemen dari berfungsinya serikat ekonomi dan moneter dengan baik dan lancar. Kerangka tata kelola ekonomi yang lebih baik harus bergantung pada beberapa kebijakan yang saling terkait dan koheren untuk pertumbuhan dan pekerjaan yang berkelanjutan, khususnya

strategi Uni untuk pertumbuhan dan pekerjaan, dengan fokus khusus pada pengembangan dan penguatan pasar internal, mendorong perdagangan dan daya saing internasional, Semester Eropa untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi dan anggaran atau *European Semester*, kerangka kerja yang efektif untuk mencegah dan memperbaiki defisit pemerintah yang berlebihan yang disebut dengan *Stability and Growth Pact (SGP)*, kerangka kerja yang kuat untuk mencegah dan memperbaiki ketidakseimbangan makroekonomi, persyaratan minimum untuk kerangka anggaran nasional, dan peningkatan regulasi dan pengawasan pasar keuangan, termasuk pengawasan makroprudensial oleh *European Systemic Risk Board (ESRB)*. Penguatan tata kelola ekonomi harus mencakup keterlibatan yang lebih dekat dan lebih tepat waktu dari Parlemen Eropa dan parlemen nasional. Sementara mengakui bahwa rekan-rekan Parlemen Eropa dalam kerangka dialog adalah lembaga-lembaga yang relevan dari Uni dan perwakilan mereka, komite yang kompeten dari Parlemen Eropa dapat menawarkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertukaran pandangan ke Negara Anggota<sup>3</sup>.

Memenuhi kriteria ekonomi membutuhkan struktural langgeng yang membutuhkan waktu untuk dicapai. Masalah rekam jejak menjadi sangat relevan. Dalam konteks ini, konsep rekam jejak berarti hal yang tak dapat diubah, berkelanjutan dan implementasi reformasi dan kebijakan yang dapat diverifikasi untuk jangka waktu yang cukup lama untuk memungkinkan perubahan dalam harapan dan perilaku pelaku ekonomi dan untuk menilai pencapaian itu akan tahan lama (European Union, 2015).

### 2.3 Kriteria Acquis

*The acquis communautaire* adalah konsep yang sangat penting di Uni Eropa yang mencakup semua perjanjian, undang-undang Uni Eropa, perjanjian internasional, standar, putusan pengadilan, ketentuan hak-hak dasar dan prinsip-prinsip horizontal dalam perjanjian seperti kesetaraan dan non-diskriminasi yang singkatnya disebut hukum Uni Eropa. Semua negara anggota dan warganya harus mematuhi Acquis dan semua negara calon harus menerima Acquis sepenuhnya untuk menjadi anggota Uni Eropa (EU-ASEAN Business Council, 2011).

Acquis atau *acquis communautaire* mengacu pada aturan dan kebijakan Persatuan Eropa. peraturan ini mencakup keseluruhan undang-undang Komunitas Eropa, Perjanjian pendirian Roma, semua arahan yang disahkan oleh Dewan Menteri serta semua keputusan

yang dibuat oleh Pengadilan Eropa. Adopsi *acquis* difokuskan pada detik *PHARE* tujuan investasi. Negara-negara kandidat harus menyesuaikan perusahaan dan infrastruktur mereka untuk menghormati norma dan standar masyarakat. Investasi *PHARE* di negara-negara ini membantu mereka untuk mengadopsi *acquis* lebih cepat untuk memindahkan akses mereka ke Uni Eropa. Program Komunitas Eropa terbuka untuk negara-negara kandidat untuk memfasilitasi pengenalan mereka dengan kebijakan Komunitas. Hal ini karena bagian integral dari keanggotaan Uni Eropa adalah kerjasama negara-negara anggota dalam bidang kebijakan tertentu seperti yang mengenai kesehatan dan lingkungan (Rezler, 2011).

Komisi Uni Eropa menilai aplikasi Ukraina berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Eropa di Kopenhagen pada tahun 1993, serta di Madrid pada tahun 1995, terutama mengenai kapasitas administrasi negara tersebut. Opini tersebut juga mempertimbangkan upaya Ukraina dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Asosiasi (AA) dan Area Perdagangan Bebas Mendalam dan Komprehensif (DCFTA), yang mulai berlaku pada 1 September 2017. Komisi akan menilai dampak akses Ukraina pada bidang kebijakan Uni Eropa pada tahap selanjutnya (Rezler, 2015).

Secara keseluruhan, dalam hal kriteria politik, Ukraina sangat maju dalam mencapai stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan penghormatan dan perlindungan terhadap minoritas. Mengenai kriteria ekonomi, Ukraina telah melanjutkan catatan ekonomi makronya yang kuat, menunjukkan ketahanan yang patut diperhatikan dengan stabilitas makroekonomi dan keuangan yang dipastikan juga setelah invasi Rusia pada Februari 2022. Ini tidak hanya mencerminkan tekad politik yang sangat kuat, tetapi juga institusi yang berfungsi dengan baik. Pada saat yang sama, reformasi struktural yang ambisius untuk menghapus korupsi, mengurangi jejak Negara dan pengaruh oligarki yang terus-menerus, memperkuat hak milik pribadi dan meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja perlu dilanjutkan di Ukraina untuk meningkatkan fungsi ekonomi pasarnya. Kapasitas negara untuk mengatasi tekanan persaingan di UE akan sangat bergantung pada bagaimana investasi pascaperang di Ukraina dirancang dan diurutkan untuk meningkatkan modal fisiknya, meningkatkan hasil pendidikan, dan memacu inovasi. Mengenai kapasitas untuk memenuhi kewajiban keanggotaan, Ukraina telah bekerja sejak 2016 dalam implementasi Perjanjian Asosiasi UE-Ukraina, termasuk Area Perdagangan Bebas yang Dalam dan Komprehensif

(AA/DFCTA). Perjanjian-perjanjian ini sudah menangkap jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dari akuisisi Uni Eropa. Ukraina secara bertahap mendekati elemen substansial dari kesepakatan UE di banyak bab. Ini memiliki rekam jejak implementasi yang memuaskan secara keseluruhan, sementara di beberapa sektor negara ini lebih maju daripada yang lain (Heinrich Boll Stiftung, 2022).

### **3. FAKTOR IDENTITAS**

#### **Perbedaan Identitas Nasional Ukraina dan Uni Eropa**

Identitas negara merupakan konsep yang hadir sebagai akibat dari tidak adanya otoritas dan komunitas tunggal dalam sistem internasional saat ini. Sebab, jika terdapat otoritas atau komunitas tunggal, akan ada seperangkat norma serta nilai yang harus dipatuhi oleh semua negara. Konsep Identitas Negara pun tidak akan ada sebab perbedaan antar negara juga tidak ada<sup>4</sup>. Dari perspektif konstruktivis, penolakan Uni Eropa terhadap pengajuan *fast-track membership* juga didasarkan pada faktor identitas. Dari segi identitas, keanggotaan Ukraina di Uni Eropa sangat penting bagi kedua pihak.

#### **Identitas Nasional Ukraina**

Pada tahap sekarang, masalah penentuan geopolitik dan identitas peradaban Ukraina benar-benar cukup mendesak karena niat negara untuk bergabung dengan keluarga negara-negara Eropa atau untuk tetap berada di wilayah pasca-Soviet interaksi sekali lagi menempatkan prioritas dan orientasinya dalam agenda, dan berpengaruh terhadap arah kebijakan luar negerinya. Selain itu, keputusan geostrategis utama, yang sekarang harus diambil oleh Ukraina otoritas, pada kenyataannya, harus menentukan sifat keyakinan identitas yang didukung oleh semua masyarakat Ukraina. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah sangat berpengaruh, dengan mempertimbangkan prioritas strategis yang diatur dalam Undang-Undang Ukraina “Pada Landasan Kebijakan Domestik dan Luar Negeri” 1 Juli 2010, dan ikatan sosial dan budaya dengan sebagian besar bekas republik Soviet yang didukung oleh penduduk Ukraina. Alasan mengapa pihak berwenang Ukraina memaksa kesimpulan dari Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa tidak selalu jelas untuk rata-rata warga negara Ukraina. Mendukung gagasan “Eropa dan Ukraina”, pada saat yang sama, memahami implikasi historisnya, warga Ukraina sering tidak menyadari perbedaan antara Eropa sebagai geografis realitas dan Uni Eropa sebagai entitas politik dan ekonomi tertentu.

Kurangnya informasi yang akurat tentang hal itu tidak memungkinkan orang-orang Ukraina untuk memahami keberadaan sejumlah besar Uni Eropa persyaratan yang harus diikuti untuk mendekati organisasi ini, sebaliknya dengan tidak adanya persyaratan seperti itu dari pihak Serikat Pabean dipimpin oleh Federasi Rusia (Heinrich Boll Stiftung, 2011).

### **Identitas Nasional Uni Eropa**

Istilah "Eropa" melibatkan faktor-faktor geografis, sejarah, dan budaya yang berkontribusi, pada tingkat yang berbeda-beda, dalam membentuk identitas Eropa berdasarkan hubungan, gagasan, dan nilai sejarah bersama - tetapi tanpa ini tentu saja membatalkan identitas nasionalnya.

Eropa dikelilingi oleh laut di Utara, Barat dan Selatan, tetapi tidak ada batasan geografis yang jelas untuk proyek Eropa di Timur. Selain itu, semua proyek untuk penyatuan dan perdamaian abadi sejak abad ke-18 adalah bagian dari alasan kosmopolitik. Identitas geografis Eropa dipahami secara luas sebagai Organisasi untuk Keamanan dan Perdamaian di Eropa (OSCE) mencakup 57 negara dari Vancouver hingga Vladivostok; Dewan Eropa memiliki 47 anggota, termasuk Rusia dan Turki. Selain itu, perluasan Uni Eropa yang berkelanjutan lebih terlihat seperti proses perluasan tanpa batas daripada definisi kerangka teritorial, yang sangat penting untuk pengembangan identitas kolektif (Heinrich Boll Stiftung, 2011).

Pada tahap sekarang, masalah penentuan geopolitik dan identitas peradaban Ukraina benar-benar cukup mendesak karena niat negara untuk bergabung dengan keluarga negara-negara Eropa atau untuk tetap berada di wilayah pasca-Soviet interaksi sekali lagi menempatkan prioritas dan orientasinya dalam agenda, dan berpengaruh terhadap arah kebijakan luar negerinya. Selain itu, keputusan geostrategis utama, yang sekarang harus diambil oleh Ukraina otoritas, pada kenyataannya, harus menentukan sifat keyakinan identitas yang didukung oleh semua masyarakat Ukraina. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah sangat berpengaruh, dengan mempertimbangkan prioritas strategis yang diatur dalam Undang-Undang Ukraina "Pada Landasan Kebijakan Domestik dan Luar Negeri" 1 Juli 2010, dan ikatan sosial dan budaya dengan sebagian besar bekas republik Soviet yang didukung oleh penduduk Ukraina. Alasan mengapa pihak berwenang Ukraina memaksa kesimpulan dari Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa tidak selalu jelas untuk rata-rata warga negara Ukraina. Mendukung gagasan "Eropa dan Ukraina", pada saat yang sama, memahami implikasi historisnya, warga Ukraina sering tidak menyadari perbedaan antara

Eropa sebagai geografis realitas dan Uni Eropa sebagai entitas politik dan ekonomi tertentu. Kurangnya informasi yang akurat tentang hal itu tidak memungkinkan orang-orang Ukraina untuk memahami keberadaan sejumlah besar Uni Eropa persyaratan yang harus diikuti untuk mendekati organisasi ini, sebaliknya dengan tidak adanya persyaratan seperti itu dari pihak Serikat Pabean dipimpin oleh Federasi Rusia<sup>5</sup>.

Aspirasi untuk menjadi bagian dari Uni Eropa telah bertahun-tahun menjadi prioritas penting bagi Ukraina, pemerintah dan warganya. Ini telah menjadi motif yang mendasari perubahan demokrasi selama dekade terakhir dan pendorong sejumlah reformasi kunci yang didasarkan pada nilai-nilai Eropa. Keputusan pada akhir 2013, dari Presiden saat itu untuk tidak menandatangani, Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Ukraina, yang melambangkan bagi banyak orang Ukraina jalan menuju Uni Eropa, menyebabkan protes besar-besaran terhadap pihak berwenang. Selanjutnya, Federasi Rusia bergerak melawan Ukraina, tidak menerima pilihan independen rakyat Ukraina. Sementara kehilangan kendali atas sebagian wilayahnya dan menderita kerugian manusia dan ekonomi karena konflik di bagian timur negara itu, Ukraina terus berlanjut selama bertahun-tahun sebagai demokrasi tangguh yang bergerak lebih dekat ke Uni Eropa dan secara bertahap menyelaraskan dengan *acquis* (EU Commission, 2022).

#### **D. Kesimpulan**

Faktor Penolakan Uni Eropa terhadap fast-track membership Ukraina yang pertama adalah faktor norma yaitu proses masuk Uni Eropa yang panjang dan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi Ukraina kemudian faktor identitas yaitu perbedaan identitas antara Uni Eropa dan Ukraina.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Folker, Jennifer Sterling. (2006), *Making Sense Of International Relations Theory*, (London: Lynne Publisher).
- Ikbar, Yanuar. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung: PT Refika Aditama).
- Jackson, Robert dan George Sorensen. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, Fifth edition (Oxford: Oxford University Press,).
- Klotz, Audie and Cecilia Lynch. (2007). *Strategies for Research in Constructivist*



International Relations (M.E. Sharpe).

Hadiwinata, Bob Sugeng. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internaisonal: Arus. Utama, Alternatif, dan Reflektivis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017

Thomas, Christiansen. (2001). *European and Regional Integration in John Baylis and Steve Smith, eds., The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 2nd edition*. Oxford: Oxford University Press.

## Jurnal

Azizi, Abdula. (2015). *Economic Criteria for EU Membership and Legislation on Economic Reforms in Macedonia*, Macedonia: 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBE.

Fierro, Elena. (2003). *The EU's Approach to Human Rights Conditionality in Practice*, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers).

Bartelson, Jens. (2001). *The critique of the state*. Cambridge University Press.

Hochleitner, Erich. (2005). *The Political Criteria of Copenhagen and their application to Turkey, Working Paper*, Austrian Institute for European Security Policy.

Pramono, Sugiarto dan Andi Purwono. (2010). *Konstruktivisme Dalam Hubungan Internasional: Gagasan Dan Posisi Teoritik*, (Universitas Wahid Hasyim).

Rezler, Paulina. (2011). *The Copenhagen Criteria: Are They Helping Or Hurting The European Union?*, *Touro International Law Review*, Volume 14, No. 2.

## Internet

Ab.gov.tr.com , (21 mei 2020) , *Enlargement of the European Union*, diakses dari [https://www.ab.gov.tr/109\\_en.html](https://www.ab.gov.tr/109_en.html) pada 7 Juli 2022 pukul 14.

Euabc.com, *Acquis communautaire*, diakses dari <http://en.euabc.com/word/12> pada 26 Juli 2022 pukul 09.16.

Eu.boell.org, *Europe and the Ukrainian Civic National Identity*, diakses dari <https://eu.boell.org/en/2018/04/25/europe-and-ukrainian-civic-national-identity>, pada 26 juli 2022 pukul 12.13.

Eeas.europa.eu, *EU Commission's Recommendations for Ukraine's EU candidate status*, diakses dari [https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu-commissions-recommendations-ukraines-eu-candidate-status\\_en?s=232](https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu-commissions-recommendations-ukraines-eu-candidate-status_en?s=232) pada 26 Juli 2022 pukul 01.14.

European Economy, 2012, *Progress towards meeting the economic criteria for EU accession: the EU commission's 2012 assesments, Occasional Papers 122*, Diakses dari [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/publications/occasional\\_paper/2012/pdf/ocp122\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp122_en.pdf) pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 11.30, Hal.2-3

- Fella, Stefano , 2022, *The EU response to the Russian invasion of Ukraine*, Research Breafing, House of Commons Library (2022).
- ec.europa.eu, accession criteria, diakses dari [https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/accession-criteria\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/accession-criteria_en) pada 18 Juli 2022 pukul 18.30.
- Hatton, Luccy. Civitas.org.uk, *Democracy in the EU*, diakses dari <https://www.civitas.org.uk/content/files/CIT5.-Dem.pdf> pada 19 Juli 2022 pukul 01.10.
- Helsinki Rule of Law Forum, *A Declaration on the Rule of Law in the European Union*, diakses dari [verfassungsblog.de/a-declaration-on-the-rule-of-law-in-the-european-union/](http://verfassungsblog.de/a-declaration-on-the-rule-of-law-in-the-european-union/) pada 19 Juli 2022 pukul 01.31
- Official Journal of the European Union, 2011, *Regulation of the European Parliament and of the Council*, Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548080620656&uri=CELEX:32011R1176> pada 20 Juli 2022 pukul 10.55.
- Pasuhuk, Hendra. Sekilas Sejarah Terbentuknya Uni Eropa, diakses dari <https://www.dw.com/id/sejarah-terbentuknya-cikal-bakal-uni-eropa-70-tahun-lalu/a-48861327> pada 18 Juni 2022 pukul 16.30.
- Prasetyo, Agung “Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif, Mahasiswa Wajib Tahu”, diakses dari <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> pada 16 Juni pukul 08.05
- Sawe, Benjamin Elisha, 2017, *The Copenhagen Criteria: What Makes A Country Eligible To Join The European Union*, Diakses dari <https://www.worldatlas.com/articles/the-copenhagencriteria-what-makes-a-country-eligible-to-join-the-european-union.html> pada 18 Juli 2022 pukul 18.35.
- schengenvisa.info.com, (9 market 2022) ‘How Countries Become New EU Members: Rules, Criteria & Procedures Explained’, diakses dari <https://www.schengenvisa.info.com/news/how-countries-become-new-eu-members-rules-criteria-procedures-explained/> pada 7 Juli 2022 pukul 14.35